



**PERSAINGAN POLITIK DALAM ORGANISASI MASSA:
STUDI KASUS KONFLIK DALAM ORGANISASI HKTI
(Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).**

LAPORAN PENELITIAN

OLEH :

BUDI SETIYONO, SSOS, MPOL. ADMIN, PHD

**DIBIYAI SUMBER DANA DIPA FISIP UNDIP
TAHUN ANGGARAN 2011**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2011**



**PERSAINGAN POLITIK DALAM ORGANISASI MASSA:
STUDI KASUS KONFLIK DALAM ORGANISASI HKTI
(Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).**

LAPORAN PENELITIAN

OLEH :

BUDI SETIYONO, SSOS, MPOL. ADMIN, PHD

**DIBIYAI SUMBER DANA DIPA FISIP UNDIP
TAHUN ANGGARAN 2011**

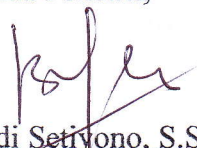
**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2011**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Persaingan Politik Dalam Organisasi Massa : Studi Kasus Konflik Dalam Organisasi HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D.
 - b. Jenis Kelamin : L/P
 - c. NIP : 19711011 199702 1 001
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor /III c
 - f. Fakultas/Jurusan : FISIP Ilmu Pemerintahan
 - g. Pusat Penelitian : -
 - h. Alamat : Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
 - i. Telp/Fax : (024) 7465407 Fax (024) 7465405
 - j. Alamat Rumah : Jl. Sadewa III No.8 Ungaran, Kabupaten Semarang
 - k. Telp/Fax/Email : 081901551199
email : bsetiyono@hotmail.com
3. Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan
4. Pembiayaan : Rp 3.789.473 (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

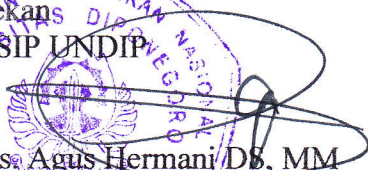
Semarang, 29 September 2011

Ketua Peneliti,


Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D.
NIP. 19711011 199702 1 001

Menyetujui,

Dekan
FISIP UNDIP


Drs. Agus Hermani/DB, MM
NIP. 19570807 198511 1 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


Prof. Drs. Imam Ghozali, M.Com, Akt, Ph.D.
NIP. 19580816 298603 1 002

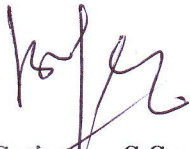
Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : “Persaingan Politik Dalam Organisasi Massa : Studi Konflik Dalam Organisasi HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)”
2. Ketua Penelitian :
 - a. Nama Lengkap : **Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D.**
 - b. Golongan Pangkat dan NIP : III C /19711011 199702 1 001
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Pemerintahan
3. Alamat Peneliti :
 - a. Alamat Kantor : Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
 - b. Alamat Rumah : Jl. Sadewa III No.8 Ungaran, Semarang
4. Lokasi Penelitian : Nasional
5. Lama Penelitian : 3 bulan
6. Biaya Penelitian : Rp 3.789.473,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
7. Sumber Dana : Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP Tahun Anggaran 2011

Semarang, 29 September 2011

Peneliti,

Pejabat Pembuat Komitmen,

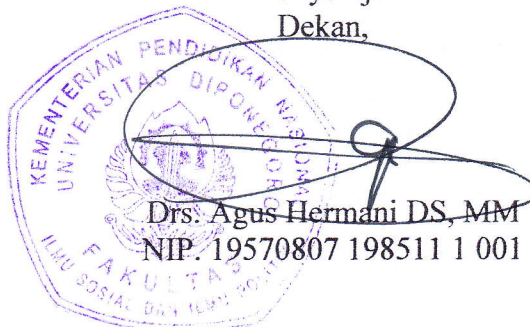


Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D.
NIP. 19711011 199702 1 001



Drs. Handoyo DW, M.Si
NIP. 19580117 198710 1 001

Menyetujui
Dekan,



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D.
NIP : 19711011 199702 1 001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian yang kami susun dengan judul :

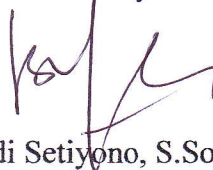
**Persaingan Politik Dalam Organisasi Massa :
Studi Konflik Dalam Organisasi HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)**

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 29 September 2011

Pembuat Pernyataan,



Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D.

NIP.19711011 199702 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji terpanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkah dan Rahmat-NYA sehingga laporan penelitian ini bisa selesai pada waktunya.

Penelitian tentang Persaingan politik dalam organisasi massa: Studi Kasus Konflik Dalam Organisasi HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) ini terwujud berawal dari pengamatan terhadap terjadinya konflik yang memecahbelah HKTI. Konflik tersebut memecah HKTI menjadi dua kelompok yang sulit dipersatukan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu terselesaikannya laporan penelitian ini. Semoga budi baik ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan kritik membangun akan sangat penulis butuhkan demi sempurnanya tulisan ini.

Akhir kata, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 29 September 2011

Penulis

Abstraksi

Konflik dalam suatu organisasi adalah suatu hal yang wajar karena adanya perselisihan atau pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kebutuhan, nilai dan kepentingan antara orang yang bekerja bersama-sama. Konflik biasanya lebih mudah terjadi di organisasi yang memiliki kelemahan dalam sistem manajemen internal, sementara pengaruh eksternal cukup kuat mempengaruhi. Di Indonesia, konflik terjadi di hampir semua organisasi-organisasi besar yang memiliki pengaruh dan anggota yang besar. Konflik itu terjadi karena benturan-benturan kepentingan antar pengurus organisasi itu untuk menggunakan potensi organisasi untuk kepentingan politik. Salah satu organisasi yang mengalami konflik internal hebat adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Konflik berawal saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI, di Bali, pada 13 Juli 2010. Munas organisasi tersebut berakhir kisruh karena salah satu pihak menyatakan pelaksanaan Munas dianggap cacat prosedur. Salah satu pihak kemudian mengadakan Munas sendiri dan kekisruhan itu selanjutnya menghasilkan dua kepengurusan berbeda. Kepengurusan yang satu dipimpin oleh Prabowo Subianto, sedangkan yang lainnya diketuai oleh Oesman Sapta.

Penelitian ini mendokumentasikan dan menganalisis konflik dalam tubuh organisasi HKTI. Penelitian ini menemukan, bahwa konflik tersebut utamanya disebabkan karena HKTI tidak memiliki budaya organisasi yang partisipatif. Secara historis, HKTI dilahirkan melalui proses top-down, sehingga anggota-anggotanya tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap organisasinya. Pun tidak ada keseimbangan hak-kewajiban yang diimplementasikan secara ketat. Anggota pada umumnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap para pemimpinnya dan tidak membayar iuran secara teratur. Akibatnya manakala elite berkonflik karena kepentingan politik yang berbeda, anggota lainnya ikut berkonflik dan hanya bersikap pasif dan terbelah-belah. Tujuan dan core dasar kepentingan petani juga tidak terlalu diperhatikan karena selama ini mereka tidak memiliki kemandirian dan cenderung menuruti inisiatif dan kehendak para elit belaka.

Untuk menyelesaikan atau mencegah konflik di masa datang, penelitian ini merekomendasikan agar para anggota HKTI harus memiliki kepedulian, partisipasi, dan kemandirian yang tinggi dalam mengelola organisasi.

Abstract

Conflict within an organization is a natural thing because of differences needs, values and interests between its members. Conflicts are usually more likely to occur in organizations that have weaknesses in internal management system, while the influence of external is strong. In Indonesia, the conflict occurs in almost all large organizations with large membership. The conflicts occur because of conflicting interest between the leaders who use the organizations for political purposes. One organization that has great internal conflict is the Indonesian Farmers Association (HKTI). The conflict began on the National Conference of HKTI, in Bali, on July 13, 2010. The conference created organizational split because one party considers that the General Assembly flawed out of procedure. They then held another national conference and muddle it further to produce two different stewardships. One stewardship is led by Prabowo Subianto, while the other headed by Oesman Sapta.

This study documents and analyzes the conflict within the organization HKTI. The study found that the conflict is due to HKTI's lack of participative organizational culture. Historically, HKTI born through top-down process, so that its members do not have a strong sense of belonging to the organization. There is no balance between the members' rights and obligations that are strictly implemented. Members in general have a high dependence on their leaders and do not regularly pay dues. As a result, when the elite engage in conflicts because of different political interests, the general members also involved in the conflict and just being passive and split apart. The objectives and basic core interests of farmers are also not particularly noted since they do not have the independence and tend to follow the initiative and sheer will of the elites.

To resolve or prevent such conflict in the future, this study recommends that the members of HKTI should have a concern, participation, and independence in managing the organization.

Daftar Isi

Abstraksi.....	3
BAB I: PENDAHULUAN	5
Latar Belakang.....	5
Perumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian.....	7
Kontribusi Penelitian	7
Manfaat Penelitian	7
Tinjauan Pustaka	8
Konflik dalam Organisasi.....	10
Metode Penelitian	11
BAB II: FUSI YANG DIREKAYASA DARI ATAS: SEJARAH HKTI.....	13
Organisasi Rakyat Tani dalam Politik dan Pemerintahan Indonesia	13
Lahirnya Ormas-Ormas Tani.....	14
Lahirnya HKTI: Dimulai dari Fusi Ormas-ormas Tani	17
HKTI: Dari Tahun 1973-2010.....	19
Munas VII HKTI Tahun 2010 yang Bermasalah	22
BAB III: DIMENSI POLITIK DALAM KONFLIK HKTI.....	24
Antara Konflik Mekanisme Organisasi dan Konflik Antar Partai Politik	24
Nuansa Politik yang Kental dan Aktor yang Berperan dalam Konflik.....	29
Pergerakan Kedua Kubu Kepengurusan	35
BAB IV: POTENSI DAN ARAH REKONSILIASI	42
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	48

BAB I: PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik dalam suatu organisasi adalah keadaan yang disebabkan oleh perselisihan atau pertentangan karena perbedaan kebutuhan, nilai dan kepentingan antara orang yang bekerja bersama-sama. Menurut Gareth R. Jones and Jennifer M. George (2010, h. 44):

"Organizational conflict is the discord that arises when the goals, interests or values of different individuals or groups are incompatible and those individuals or groups block or thwart one another's attempts to achieve their objective"

Ada banyak bentuk konflik dalam organisasi. Ada bentrokan tak terhindarkan karena penggunaan otoritas formal dan kekuasaan dengan orang-orang dan kelompok yang terkena dampak. Ada perselisihan berkaitan dengan bagaimana pendapatan harus dibagi, bagaimana pekerjaan harus dilakukan, dan berapa lama dan orang-orang harus bekerja keras. Ada ketidaksepakatan yurisdiksi antar individu dan departemen. Ada juga konflik yang melibatkan persaingan, kecemburuan, bentrokan kepribadian, peran, dan perjuangan untuk kekuasaan dan kenikmatan.

Konflik seperti itu terjadi di banyak organisasi seperti perusahaan, partai politik, organisasi profesi dan organisasi sosial. Konflik biasanya lebih mudah terjadi di organisasi yang memiliki kelemahan dalam sistem manajemen internal, sementara pengaruh eksternal cukup kuat mempengaruhi. Di Indonesia, konflik terjadi di hampir semua organisasi-organisasi besar yang memiliki pengaruh dan anggota yang besar. Konflik itu terjadi karena benturan-benturan kepentingan antar pengurus organisasi itu untuk menggunakan potensi organisasi untuk kepentingan politik.

Salah satu organisasi yang mengalami konflik internal hebat adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Konflik berawal saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI, di Bali, pada 13 Juli 2010. Munas organisasi tersebut berakhir kisruh karena salah satu pihak (Oesman Sapta) menyatakan pelaksanaan Munas dianggap cacat prosedur. Oesman lantas memilih mengadakan Munas sendiri dan kekisruhan itu selanjutnya menghasilkan dua kepengurusan berbeda. Kepengurusan yang satu dipimpin oleh Prabowo Subianto, sedangkan yang lainnya diketuai oleh Oesman Sapta.

Dualisme kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menunjukkan bahwa suara petani sangat seksi bagi para elit politik. Rebutan kursi kepemimpinan oleh Prabowo Subijanto, Ketua DPP Gerindra, yang mengaku terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HKTI dengan Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Persatuan Daerah (PPD), yang menyebut dirinya sebagai Ketua HKTI tandingan. Rebutan suara tersebut terjadi karena keduanya memiliki kepentingan politik masing-masing dan berusaha memakai HKTI sebagai kendaraan politik. Suara petani dianggap sangat penting bagi elit parpol. Suara mereka sangat signifikan dan bisa diandalkan dalam pemilu.

Terjadinya dualisme kepemimpinan HKTI itu tentu saja sangat disayangkan. Hal ini karena selain memperkeruh suasana dalam tubuh internal HKTI, konflik juga menjauhkan fokus organisasi itu yang ditujukan pada kesejahteraan petani. HKTI seharusnya menjadi organisasi petani yang independen dan benar-benar memperhatikan kesejahteraan para petani. Ironisnya, konflik muncul, tatkala harga-harga komoditi pertanian melonjak tinggi akibat petani mengalami gagal panen.

Perumusan Masalah

Bagaimanakah anatomi dan taksonomi konflik yang terjadi dalam organisasi HKTI, antara kubu Prabowo Subianto dan Oesman Sapta:

- Apakah faktor-faktor penyebab konflik

- Siapa aktor yang terlibat
- Mengapa konflik menjadi faktual
- Bagaimana proses eskalasinya
- Bagaimana usaha rekonsiliasi yang dilakukan

Tujuan Penelitian

Menjelaskan anatomi dan taksonomi konflik dalam organisasi HKTI beserta berbagai aspek yang berpengaruh.

Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- Berkontribusi bagi pengembangan kosep teoritis tentang konflik, khususnya yang terjadi di lingkungan organisasi sosial.
- Berkontribusi secara praktis untuk mengembangkan kerangka manajemen konflik dan rekonsiliasi konflik.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah teori manajemen konflik, khususnya yang berkaitan dengan konflik organisasi.

Manfaat Praktis

Bagi para pelaku manajemen, pengurus, dan anggota organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan masukan tentang bagaimana pencegahan dan penyelesaian konflik.

Tinjauan Pustaka

Definisi konflik

Persepsi ancaman, atau kejadian yang sebenarnya dari konflik, diperlukan untuk inisiasi tindakan pencegahan konflik, dan karenanya adalah penting untuk mengetahui definisi konflik sebelum menjelajahi bagaimana mencegah dan mengelolanya.

Langkah pertama adalah memahami secara tepat apakah konflik itu. Secara tradisional, konflik dipersepsikan sebagai hasil dari pertentangan kepentingan yang disebabkan sumber daya yang langka, perbedaan tujuan dan rasa frustrasi.¹ Konflik, akan tetapi, tidak harus didefinisikan secara sederhana dalam hal kekerasan (perilaku) atau permusuhan (sikap), tetapi juga termasuk ketidakcocokan atau "perbedaan dalam memposisikan masalah".

Konflik terjadi sebagai sebuah ketidaksetujuan melalui mana pihak yang terlibat melihat adanya ancaman berkaitan dengan perselisihan kepentingan-kepentingan kebutuhan-kebutuhan atau masalah. Dalam definisi sederhana tersebut, ada pemahaman penting yang muncul:

- Ketidaksepakatan - Secara umum, ada beberapa tingkat perbedaan posisi dari dua (atau lebih) pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini ketidaksepakatan versus perselisihan berbeda dari satu sama lain. Konflik cenderung disertai dengan tingkat signifikan kesalahpahaman yang membesar-besarkan ketidaksepakatan. Jika kita dapat memahami area sebenarnya dari perselisihan, ini akan membantu kita memecahkan masalah yang tepat dan mengelola kebutuhan sebenarnya dari pihak yang berkonflik.

¹ Lihat Ernst-Otto Czempel. *Internationale Politik; Ein Konfliktmodell* (Paderborn: Schöningh, 1981), 198-203.

- Pihak yang terlibat – semua orang pasti pernah terlibat dalam konflik. Kadang-kadang, orang-orang terlibat dalam berbagai titik kesamaan, sedangkan waktu lainnya mereka terlibat dalam ketidaksepakatan. Pada banyak kesempatan, orang-orang yang dipandang sebagai bagian dari sistem sosial (misalnya, tim kerja, keluarga, perusahaan) terlibat dalam sengketa, walaupun mereka secara pribadi belum tentu menginginkan situasi seperti itu atau tidak. Dalam contoh di atas, orang yang sangat mudah "mengambil sisi" berdasarkan persepsi isu-isu kontemporer, masalah masa lalu dan hubungan, peran dalam organisasi, serta faktor lainnya.
- Persepsi ancaman - Orang-orang yang berada pada suatu konflik seringkali menanggapi ancaman yang dirasakan, bukan ancaman sebenarnya, yang dihadapi mereka. Jadi, sementara persepsi tidak menjadi kenyataan *per se*, perilaku orang, perasaan dan tanggapan yang sedang berlangsung menjadi dimodifikasi oleh rasa berkembang ancaman yang mereka hadapi. Jika kita bisa bekerja untuk memahami ancaman sejati (masalah) dan mengembangkan strategi (solusi) yang mengelola itu (perjanjian), kita bertindak konstruktif untuk mengelola konflik.
- Kebutuhan, kepentingan atau keprihatinan - Ada kecenderungan untuk secara sempit mendefinisikan "masalah" sebagai salah satu substansi, tugas, dan kelangsungan hidup jangka pendek. Secara sederhana, selalu ada kebutuhan prosedural dan kebutuhan psikologis yang harus diatasi dalam konflik, di samping kebutuhan mendasar yang umum disajikan. Dan ketahanan dari kepentingan dan keprihatinan pihak yang terlibat melampaui situasi presentasi langsung. Setiap upaya untuk menyelesaikan konflik secara efektif harus memperhitungkan mengambil poin-poin ini.

Konflik dalam Organisasi

Konflik dalam suatu organisasi terjadi ketika orang (atau pihak lain) dalam suatu organisasi menganggap bahwa, sebagai konsekuensi dari perselisihan, ada ancaman terhadap kepentingan dan kebutuhan mereka. Meskipun konflik adalah bagian normal dari kehidupan organisasi karena dapat memberikan banyak kesempatan untuk pertumbuhan melalui peningkatan pemahaman dan wawasan bersama, ada kecenderungan untuk melihat konflik sebagai sebuah pengalaman negatif. Persepsi cenderung untuk melihat pilihan yang terbatas dan sumber daya yang terbatas tersedia dalam mencari solusi, daripada beberapa kemungkinan yang mungkin ada 'di luar kotak' di mana kita memecahkan masalah.

Dalam kaitan itu, ada beberapa poin yang layak diperhatikan:

1. Konflik adalah lebih dari sekedar perselisihan - itu adalah sebuah situasi di mana orang-orang melihat ancaman (fisik, emosi, kekuasaan, status, dll) untuk mereka yang baik. Dengan demikian, ini adalah pengalaman yang berarti dalam kehidupan manusia, tidak sekedar mengangkat bahu dengan sebuah ucapan, "itu akan berlalu ..."
2. Peserta dalam konflik cenderung merespon berdasarkan persepsi mereka dari situasi, daripada observasi dan pemikiran yang rasional. Dengan demikian, orang memfilter persepsi (dan reaksi) mereka melalui, kebudayaan, nilai, kepercayaan, informasi, jenis kelamin, pengalaman, dan variabel lainnya.
3. Seperti dalam masalah apapun, konflik mengandung dimensi substantif, prosedural, dan psikologis yang harus dinegosiasikan. Dalam rangka terbaik memahami ancaman yang dirasakan oleh mereka yang terlibat dalam suatu konflik, kita perlu mempertimbangkan semua dimensi.
4. Konflik adalah pengalaman normal dalam lingkungan kerja. Secara umum tiap organisasi dipastikan memiliki potensi dan situasi yang secara alamiah bisa muncul sebagai konflik. Dengan demikian, jika kita mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi konflik mungkin muncul, serta sistem

melalui mana kita dapat mengelola konflik secara konstruktif, maka kita mungkin dapat menemukan peluang baru untuk mengubah konflik menjadi pengalaman belajar yang produktif.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif-eksplanatory. Data penelitian ini diperoleh melalui indepth-interview dengan berbagai informan yang dianggap mengetahui kasus konflik tersebut. Informan diambil dengan teknik *purposive sampling*, didasarkan pada pertimbangan tertentu yakni mereka yang mengetahui duduk persoalan dalam konflik HKTI. Sejauh mungkin untuk mengecek keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni mengecek balik suatu informasi dari beberapa sumber berbeda².

Sumber Data

Sesuai dengan kaidah metode penelitian kualitatif, sumber data penelitian ini didapat dari wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi langsung, dan dokumen tertulis. Secara umum, data dapat dibagi dalam dua sumber:

- a. Data primer: yakni data yang didapat langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan, yang dalam hal ini adalah pengurus HKTI baik dari kubu Prabowo maupun Oesman Sapta.

² Denzin (2006) mengidentifikasi beberapa jenis teknik triangulasi. Salah satu jenis melibatkan konvergensi dari beberapa sumber data. Jenis lain adalah triangulasi metodologis, yang melibatkan konvergensi data dari sumber pengumpulan data ganda. Prosedur triangulasi ketiga adalah triangulasi penyidik, di mana beberapa peneliti terlibat dalam suatu penyelidikan. Prosedur lain dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan / atau kredibilitas penelitian. Ini termasuk penelitian atau audit penyelidikan, peer debriefing, dan mencari kasus negatif dalam bidang yang mungkin diinterpretasi secara keliru.

- b. Data sekunder: yakni data yang berasal dari literature berupa buku, berita Koran dan media lain, serta laporan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II: FUSI YANG DIREKAYASA DARI ATAS: SEJARAH HKTI

Organisasi Rakyat Tani dalam Politik dan Pemerintahan Indonesia

Sejak masa awal kemerdekaan, sejarah organisasi petani di Indonesia memiliki nuansa politis yang kental dibandingkan dengan nuansa professional. Organisasi petani pada umumnya, bahkan mungkin seluruhnya, dibentuk oleh partai-partai politik yang ingin mendapatkan dukungan suara petani dalam Pemilu (pemilihan umum). Pola pembentukan organisasi itu bersifat *top-down* (dari atas ke bawah), tidak *bottom up* (dari bawah ke atas). Akibatnya dinamika gerakan organisasi-organisasi petani seringkali justru berorientasi politik daripada urusan pertanian. Pola seperti ini terbentuk sejak berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berhasil dibentuk pada tanggal 27 Agustus 1945. KNIP beranggotakan 135 orang, termasuk bekas anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diangkat oleh Presiden dan Wakil Presiden. Pada 24 September 1945 Kabinet Presidentil pertama terbentuk. Presiden, atas dasar referendum dari KNIP, pada akhirnya pada tanggal 16 Oktober 1945 memberikan fungsi-fungsi DPR dan MPR kepada KNIP. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 1945 berhasil dibentuk Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) sebagai pelaksana tugas sehari-hari KNIP, yang beranggotakan 15 orang dan dipimpin oleh Syahrir dan Amir Syarifudin.

Kemudian kondisi dan dinamika politik Indonesia terus berkembang menuju bentuk parlementer. KNIP berhasil mendesak Pemerintah pada 14 Nopember 1945 untuk merubah bentuk Presidentil menjadi bentuk Kabinet dengan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Selanjutnya dalam sidang tanggal 25-27 Nopember 1945, anggota BP-KNIP yang semula berjumlah 15 orang ditambah menjadi 25 orang, dengan rincian 8 orang mewakili unsur daerah dan 17 orang mewakili unsur golongan kemasyarakatan seperti buruh, tani, pemuda, dan kekuatan nasional demokrat,

termasuk mewakili etnis Cina. Inilah yang merupakan pintu permulaan bagi keterlibatan petani dalam bidang politik dan pemerintahan.

Kedudukan wakil dari masyarakat tani dalam politik dan pemerintahan, semakin kuat setelah pada tanggal 29 Desember 1945, ketika Presiden mengeluarkan dekrit untuk menambah komposisi keanggotaan KNIP menjadi 514 orang. Rinciannya adalah 222 mewakili golongan politik, 78 orang mewakili unsur daerah, dan golongan lain-lain sebanyak 121 orang. Organisasi yang tergolongkan dalam kategori baru adalah buruh dan tani, dimana masing-masing memiliki wakil sebanyak 40 orang. Mulai saat inilah petani dan buruh secara proporsional dapat menyalurkan aspirasi mereka. Sayangnya dalam perkembangan kemudian, organisasi petani yang terbentuk diinfiltrasi oleh partai politik khususnya PKI (Partai Komunis Indonesia) – sementara partai politik lain juga membentuk organisasi petani lainnya– sehingga gerakan dan dinamika mereka sangat sarat bermuatan politik daripada sepenuhnya memperjuangkan kepentingan petani secara professional.

Lahirnya Ormas-Ormas Tani

Sebelum dikeluarkannya Maklumat Pemerintah bulan Nopember 1945, sebagai dasar kelahiran multipartai, pada tanggal 10 Nopember 1945 telah dibentuk organisasi buruh bernama Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan pada tanggal 20 Nopember 1945 lahir organisasi tani bernama Barisan Tani Indonesia (BTI). Setelah Maklumat X dari pemerintah tentang pembentukan partai politik, maka BBI dalam kongres pertama di Yogyakarta pada bulan Nopember 1945 merubah statusnya menjadi partai politik, dengan nama Partai Buruh Indonesia (PBI). Akan tetapi, BTI tidak merubah statusnya sebagai partai politik, dan tetap menjadi organisasi massa yang independen.

Pada tanggal 24 Nopember 1946, pemerintah menyerah kepada kehendak BP-KNIP untuk membentuk Kabinet versi baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri

Syahrir. Hal itu, selain merupakan awal dari penyelewengan terhadap UUD 1945, juga merupakan awal dari dilaksanakannya sistem demokrasi liberal di Indonesia. Secara otomatis dengan sistem demokrasi liberal menjadikan lahan subur dalam terbentuknya multi partai, multi ideologi politik, dan dominasi partai politik dalam parlemen, yang selanjutnya berdampak negatif pada labilnya pemerintahan, kabinet jatuh bangun silih berganti, sehingga pembangunan untun mensejahterakan rakyat terabaikan, dan yang mengkhawatirkan lagi adalah terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka menurut Soekarno (Bung Karno), demokrasi liberal di Indonesia harus ditentang dan dicarikan sistem demokrasi yang sesuai dengan jiwa dan budaya bangsa Indonesia.

Dari Soekarno muncul dua usul penting, yaitu yang pertama adalah agar disusun Kabinet Gotong Royong yang mendapatkan dukungan penuh dari semua partai politik, sehingga tidak ada lagi partai pemerintah dan partai oposisi. Usul kedua Soekarno adalah agar dibentuk Dewan Nasional (DENAS), yaitu suatu badan yang beranggotakan unsur-unsur golongan fungsional, yaitu tani, buruh, militer, wartawan, pemuda, keagamaan, cendekiawan, wanita, dan lain-lain, dan akan dipimpin langsung oleh Soekarno sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1958, Soekarno mencarikan istilah pengganti bagi golongan fungsional dengan "Golongan Karya" yang berarti suatu golongan yang memiliki jenis atau lingkungan kerja di tengah kehidupan masyarakat.

Selanjutnya pada bulan Mei 1957, pemerintah mengumumkan terbentuknya Dewan Nasional (DENAS), yang dilantik pada tanggal 12 Juli 1957. Sebagai Ketua DENAS adalah Soekarno, dan Wakilnya adalah Ruslan Abdul Gani dan unsur-unsur dari keempat angkatan bersenjata sebagai wakil secara *ex officio*. DENAS beranggotakan 14 wakil unsur daerah dan 21 wakil golongan fungsional (golongan karya). Unsur tani mendapat jatah kursi sebanyak 5 orang.

Lima hari setelah terbentuknya Denas, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Juli 1957, Angkatan Darat mempelopori terbentuknya Badan Kerja Sama (BKS)

golongan fungsional dengan militer. Pada bulan September 1957 terbentuk BKS TAMIL (Tani-Militer), BKS BUMIL (Buruh-Militer), BKS PM (Pemuda-Militer), dan lain sebagainya. Khususnya BKS TAMIL dinyatakan sebagai golongan terbesar dari rakyat Indonesia.

Adanya Pemilu tahun 1955 secara tidak langsung juga memberikan *ekses* atau pengaruh yang besar dalam lahirnya ormas-ormas tani. Masing-masing partai politik memandang penting untuk menggerakkan kader-kadernya untuk berkampanye menarik simpati masyarakat petani. Maka dari masing-masing partai politik memandang perlu untuk membentuk ormas-ormas tani. Terkecuali adalah PKI (Partai Komunis Indonesia), karena PKI telah menyusupkan kader-kadernya di Barisan Buruh Indonesia (BTI) yang sudah ada sebelumnya.

Dari dasarnya itu, maka lahirlah beberapa ormas tani yang berafiliasi langsung dengan partai politik. Ormas-ormas tani tersebut lahir baik sebelum maupun setelah Pemilu tahun 1955 dilaksanakan. Seperti Persatuan Tani Nasional Indonesia (PETANI), yang berafiliasi dengan PNI, terbentuk pada bulan Mei 1948. Sarikat Tani Islam Indonesia (STII), adalah ormas tani sayap dari Partai Masyumi, yang mulai aktif sejak Oktober 1951. Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (PERTANU) adalah ormas tani sayap Partai Nahdlatul Ulama, mulai aktif sejak Februari 1952. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) membentuk Kesatuan Tani Pancasila, yang disingkat "KATA PANCASILA".

Selain itu, ada partai-partai kecil yang juga memiliki ormas tani, antara lain adalah: Partai Kristen memiliki ormas tani dengan nama Persatuan Tani Kristen Indonesia (PERTAKIN). Ormas tani yang berafiliasi kepada Partai Katolik bernama Ikatan Petani Pancasila (IP PANCASILA). Ormas tani milik PSII bernama Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI). Partai Murba memiliki ormas tani bernama Persatuan Tani (PERTA). Ormas tani yang berafiliasi dengan PSI bernama Gerakan Tani Indonesia (GTI). Ormas tani PERTI bernama Petani Tarekat Islam Seluruh Indonesia (PETISI). Selain itu, sejak tahun 1960 muncul pula organisasi-organisasi

kekuatan pendukung Dekrit Presiden 1959, seperti KOSGORO, MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), dan juga SOKSI. Organisasi-organisasi ini juga memiliki ormas tani sebagai sayapnya, yaitu Warga Tani KOSGORO, Gerakan Tani MKGR, dan Rukun Tani Indonesia (RTI)-SOKSI. Dan ormas-ormas tanipun semakin bertambah banyak.

Lahirnya HKTI: Dimulai dari Fusi Ormas-ormas Tani

Seperti disebutkan di atas, dengan adanya inisiatif dari golongan Militer dibentuklah Badan-Badan Kerja Sama (BKS). Termasuk Badan Kerja Sama Tani (BKS-Tani).

Selanjutnya, atas dorongan pernyataan Menteri Pertanian pada Hari Tani Nasional tahun 1972 yang menyebutkan bahwa Hari Tani Nasional akan diganti menjadi Hari Krida Pertanian pada tanggal 21 Juni, dan akan mengadakan Pertemuan Nasional (Penas) Kontak Tani setiap dua tahun sekali, serta dikelompokkannya sembilan partai politik menjadi dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Maka timbullah inisiatif untuk membentuk satu wadah ormas tani.

Hingga tahun 1968, ormas tani berjumlah 15, yaitu:

1. Persatuan Tani Nasional Indonesia (PETANI);
2. Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (PERTANU);
3. Gerakan Tani Sarekat Islam;
4. Petani Sarekat Islam Indonesia (PETISI);
5. Kesatuan Tani Pancasila (KATA PANCASILA);
6. Persatuan Tani (PERTA);
7. Persatuan Tani Kristen Indonesia (PERTAKIN);
8. Ikatan Petani Pancasila (IP PANCASILA);
9. Warga Tani KOSGORO;

10. Rukun Tani Indonesia (RTI)-SOKSI;
11. Gerakan Tani MKGR;
12. Gerakan Tani Indonesia (GTI);
13. Sarikat Tani Indonesia (SAKTI);
14. Gerakan Tani Muslim Indonesia; dan
15. Sarekat Tani Islam Indonesia (STII).

Dari kelima belas ormas tani tersebut, kesemuanya menyetujui untuk dibentuknya satu wadah ormas tani, kecuali STII. Penolakan STII untuk membentuk satu wadah ormas tani adalah didasarkan pada dua alasan, yaitu: pertama, adanya kecurigaan bahwa adanya wadah tunggal ormas tani tersebut dipaksakan oleh pemerintah; kedua, ia berpendapat bahwa seharusnya keputusan tersebut diambil setelah masing-masing ormas tani melakukan Muktamar Nasionalnya, apakah setuju atau tidak untuk melebur ke dalam satu wadah ormas tani.

Mulai awal Januari 1973, pimpinan periodik Presidium BKS-Tani dijabat sebagai Ketua Z.J. Apituley (Warga Tani KOSGORO) dan Sekretaris Drs. Heroe Soeparto (Gerakan Tani MKGR). Selanjutnya dalam rapat pleno BKS-Tani pada Maret 1973 diputuskan untuk membentuk sebuah Tim Sembilan (beranggotakan 9 orang), yang mengemban tugas untuk melakukan penjajagan dan persiapan tentang kemungkinan dilakukan restrukturisasi Organisasi Massa Tani di Indonesia. Anggota Tim Sembilan adalah: 1. Ketua, Z.J. Apituley (Warga Tani KOSGORO); 2. Sekretaris, Heroe Soeparto (Gerakan Tani MKGR); 3. Anggota, H.M. Munasir (Pertanu); 4. Anggota, Imam Churmen (Pertanu); 5. Anggota, Sudjarwo (Petani); 6. Anggota, Mustafa Supangat (Kata Pancasila); 7. Anggota, Ateng Suhardi Atmaja (Perta); 8. Anggota, Moh. Thoha (Warga Tani Kosgoro); 9. Anggota, Iskandarsyah (RTI-Soksi).

Tim Sembilan mulai bekerja penuh sejak tanggal 3 April sampai tanggal 21 April 1973. Tim Sembilan mendapatkan bantuan dari Kolonel Sumardan dari BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara), sehingga sejak tanggal 15 April 1973 Tim

Sembilan mendapatkan fasilitas satu ruang pertemuan yang lebih aman dan nyaman di Jalan Senopati, Jakarta.

Setelah bekerja secara marathon, dan terus berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidangnya, yang pertama dilakukan oleh Tim Sembilan adalah menentukan nama organisasi. Atas usulan dari Heroe Soeparto, maka disepakatilah nama organisasi yang dipakai adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia disingkat HKTI. Dan selanjutnya pada tanggal 21 April 1973 disepakati Rancangan Anggaran Dasar Organisasi. Adapun Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada pimpinan organisasi yang akan dibentuk. Selanjutnya Tim Sembilan menentukan nama calon Ketua Umum organisasi yang baru. Dari rapat Tim Sembilan pada tanggal 21 April 1973, maka muncullah Martono sebagai calon tunggal Ketua Umum organisasi yang baru. Martono adalah Ketua Umum Warga Tani Kosgoro, dan juga seorang tokoh Golkar pemenang Pemilu tahun 1971.

Pada tanggal 24 April 1973 Tim Sembilan menyampaikan hasil kerjanya kepada BKS-Tani. Laporan kerja Tim Sembilan disampaikan oleh Z.J. Apituley selaku ketua Tim Sembilan dalam rapat BKS-Tani. Keputusan dari rapat tersebut adalah mengamanatkan kepada Z.J. Apituley untuk segera melaksanakan Musyawarah Top (Mustop) Pimpinan Ormas Tani anggota BKS-Tani.

Mustop Pimpinan Ormas Tani Anggota BKS-Tani berhasil dilaksanakan pada tanggal 26 April 1973 pukul 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan sederhana "Galiga", di jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat. Agenda dari Mustop tersebut adalah mendengarkan hasil kerja Tim Sembilan dan penjelasan Martono selaku Ketua Umum Ormas Tani yang baru. Dan akhir dari Musyawarah adalah pembacaan naskah deklarasi. Pembacaan naskah deklarasi tersebut dilaksanakan tepat pada pukul 00.30 WIB, tanggal 27 April 1973. Maka hari lahir HKTI diperingati pada setiap tanggal 27 April.

HKTI: Dari Tahun 1973-2010

1.1.1. Kepemimpinan Ketua Umum Martono: 1973-1992

Martono menjabat sebagai Ketua Umum HKTI mulai dari tahun 1973 sampai dengan 1992. Ia dipilih dalam Munas I HKTI tahun 1979, Munas II HKTI tahun 1984, dan Munas III HKTI tahun 1989.

HKTI sebagai ormas tani yang baru tidak bersifat federatif, akan bersifat peleburan (fusi) atau penyaturagaan segenap komponen ormas-ormas tani. Maka dari itu, tugas pertama yang diemban oleh Martono sebagai Ketua Umum HKTI yang pertama adalah melakukan konsolidasi fusi struktural, baik vertikal maupun horizontal.

Selain itu, pada masa kepemimpinan Ketua Umum Martono mulai dicantumkan tentang atribut organisasi dan lambang organisasi, serta ketentuan-ketentuan organisasional lainnya ke dalam Anggaran Dasar Organisasi. Di internal organisasi dibentuk Badan Khusus (Basus), yang terdiri dari Basus Wanita, Basus Pemuda, Yayasan Pembangunan Pertanian Pedesaan Indonesia (YP3I), Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH), Basus Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Direktorium Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Martono, selaku Ketua Umum HKTI juga melakukan beberapa kerjasama dengan organisasi-organisasi eksternal, baik organisasi non pemerintah maupun dengan organisasi pemerintahan. Martono juga menjalin hubungan baik dengan Presiden Soeharto pada waktu itu. Selain itu, HKTI di bawah kepemimpinan Martono juga mengadakan kerjasama atau hubungan dengan pihak internasional, antara lain dengan *International Federation Agricultural Producer (IFAP)*, Tani ASEAN, *International Federation of Plantation Agricultural and Allied Worker (IFPAAW)*, AIRD dan CENDDHRA, *Konrad Adenauer Stiftung (KAS)*, *Nambo Corporation (Nambo Corp)*,

1.1.2. Kepemimpinan Ketua Umum H.M. Ismail: 1993-1999

Munas IV seharusnya dilaksanakan pada tahun 1994. Pelaksanaannya dipercepat untuk merespon keinginan dari Ketua Umum Martono yang sedang sakit keras, dan dapat meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum secara demokratis. Martono meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1992, dan masih dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum HKTI.

Munas IV berhasil menetapkan HM Ismail sebagai Ketua Umum dan Ida Bagus Putra sebagai Sekretaris. Masa kepemimpinan HM Ismail adalah masa "lesu darah". Kehidupan organisasi masih tertolong dengan adanya dana bantuan dari hasil kerjasama HKTI dan KAS. Akan tetapi, dana dari KAS tersebut juga tidak dapat digunakan secara tepat guna, dan hanya habis untuk keperluan perjalanan ke luar negeri sebanyak 18 kali.

Melihat kondisi organisasi yang demikian, Solihin GP dan kawan-kawan membentuk HKTI Reformasi yang berkantor di Jalan Angkasa Raya No. 18 Jakarta Pusat. Yang terlibat aktif dalam HKTI Reformasi ini adalah Solihin GP, Ir. HL Gaol, Asral SH, Sam Patty, Heroe Soeparto, Hasan Sulaeman, Marwoto, KUSDIONO, dan Sutanto. Selanjutnya untuk menangani kegiatan-kegiatan operasional, HKTI Reformasi membentuk lembaga berupa yayasan yang diberi nama "GERBANG UTAMA" (Gerakan Pembangunan Usaha Tani Mandiri).

1.1.3. Kepemimpinan Ketua Umum Siswono Yudho Husodo: 1999-2004

Untuk mengakhiri masa kepemimpinan HM Ismail sebagai Ketua Umum HKTI adalah harus menunggu diadakannya Munas V sebagai satu-satunya jalan konstitusional organisasi dan demokratis. Munas V dilaksanakan pada bulan Februari 1999. Munas V berhasil menetapkan Siswono Yudho Husodo sebagai Ketua Umum, dan Banbang Ismawan sebagai Sekretaris Jendral.

Masa kepemimpinan Siswono dianggap sebagai masa bergairahnya kembali geliat pertanian HKTI. Beberapa program dijalankan dengan baik dalam masa kepemimpinan Siswono ini. Seperti Program Penguatan Petani, yang

meliputi Program Sertifikasi Tanah, Pengembangan Agribisnis, Pengembangan Keuangan Mikro. Serta mencanangkan Pengembangan Program Rintisan, Advokasi Pertanian, dan peningkatan kedisiplinan organisasi.

1.1.4. Kepemimpinan Ketua Umum Prabowo Subianto: 2004-2009

Prabowo Subianto dipilih melalui Munas VI HKTI yang diselenggarakan pada tahun 2004, yaitu setelah diselenggarakannya Pilpres.

Tidak seperti masa kepemimpinan Siswono, masa kepemimpinan Prabowo dianggap kembali pada masa “lesu darah” dan stagnasi organisasi. Yang terjadi adalah pada tahun 2004 sampai 2005, diadakan Audiensi dan juga beberapa MoU (*Memorandum of Understanding*), akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut tanpa dibarengi dengan adanya program-program aksi yang nyata. Mulai tahun 2006 sampai tahun 2008 adalah masa stagnasi organisasi tanpa adanya program kerja yang jelas.

Munas VII HKTI Tahun 2010 yang Bermasalah

Masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI, secara organisatoris berakhir pada bulan Desember 2009. Akan tetapi, Munas baru dapat dilaksanakan pada bulan Juli 2010, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2010 dan bertempat di Hotel Inna Grand Sanur-Bali.

Pada Munas VII muncul beberapa nama calon Ketua Umum, antara lain adalah Jafar Hafsa, Titiek Soeharto, dan Oesman Sapta Odang. Dan dari sebanyak 30 Pengurus Provinsi HKTI se Indonesia, dalam Munas VII tersebut, menyetujui untuk diangkatnya kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI kembali, untuk periode masa tahun 2010-2015. Disetujui pula dari hasil Munas VII Fadli Zon sebagai Sekretaris Jendral HKTI. Beberapa pengurus menyatakan keputusan ini adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi HKTI.

Akan tetapi, ada beberapa dari peserta sidang yang merasa tidak puas dengan hasil Munas VII yang menetapkan Prabowo sebagai Ketua Umum, dan Fadli Zon sebagai Sekretaris Jendral. Mereka yang tidak puas menyatakan bahwa terdapat pelanggaran AD/ART yang dilakukan oleh kepengurusan HKTI kepemimpinan Prabowo, semenjak perencanaan Munas sampai pada pelaksanaan Munas. Tokoh-tokoh penting HKTI yang tergabung dalam kelompok ini adalah Heroe Soeparto (Pendiri HKTI), dan Siswono Yudho Husodo (Mantan Ketua Umum dan menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi periode 2004-2009).

Kelompok yang tidak puas dengan hasil Munas VII selanjutnya menyatakan sebuah pernyataan sikap penolakan terhadap hasil Munas VII, yang diteruskan dengan menyelenggarakan Munas VII lanjutan di Hotel Aston Denpasar Bali. Dan dari Munas tersebut berhasil menetapkan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Benny Pasaribu sebagai Sekretaris Jenderal. Sejak saat itulah terjadi dualisme kepengurusan hingga saat ini.

BAB III: DIMENSI POLITIK DALAM KONFLIK HKTI

Antara Konflik Mekanisme Organisasi dan Konflik Antar Partai Politik

Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnya, HKTI adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pertanian yang merupakan hasil fusi atau penggabungan dari 14 ormas tani yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Ormas Tani.

Sejak berdirinya hingga sekarang ini, HKTI setidaknya telah melaksanakan tujuh kali Musyawarah Nasional (Munas) dan telah memiliki lima nama Ketua Umum. Diantaranya adalah Martono (1973-1992), H.M. Ismail (1993-1999), Siswono Yudo Husodo (1999-2004), Prabowo Subianto (2004-2009), dan kemudian pecah dalam periode selanjutnya dengan duo kepemimpinan Prabowo Subianto dan Oesman Sapta (2010-2015). Dalam suksesi pengangkatannya, hampir semua Ketua Umum tanpa ada masalah. Hanya saja dalam suksesi pengangkatan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya dalam Munas VII di Bali, timbul konflik antar Pengurus Nasional HKTI. Hingga dari konflik tersebut timbul pula dualisme kepengurusan HKTI. Di satu sisi kepengurusan yang menyatakan diri diketuai oleh Prabowo Subianto, dan yang lain menyatakan diketuai oleh Oesman Sapta. Mengapa demikian?

Mereka yang ada di jajaran kepengurusan HKTI versi Oesman Sapta menyatakan bahwa Prabowo Subianto tidak menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART dan pedoman organisasi, untuk selanjutnya agar tetap bisa menjadikan HKTI sebagai kendaraan politik Prabowo dalam menuju Pemilu periode mendatang. Di sisi lain jajaran kepengurusan HKTI versi Prabowo Subianto menyatakan bahwa di dalam konflik dualisme ini, ada semangat untuk merebut kembali tampuk pimpinan HKTI setelah Prabowo menjadi Ketua Umum dan menjadikan gaung organisasi HKTI semakin meluas ke seluruh pelosok Nusantara.

Jusmi Dwi Atmoko, Wakil Ketua HKTI Provinsi Jawa Tengah versi Oesman Sapta, menyatakan bahwa Prabowo ingin menjadikan HKTI sebagai kendaraan politiknya menuju Pemilu periode selanjutnya tahun 2014. Untuk itu Prabowo harus tetap menjadi Ketua Umum HKTI. Demi mencapai tujuannya itu, maka apapun akan dia lakukan termasuk apabila melanggar AD/ART organisasi. Jusmi mengatakan,

“Berkaitan dengan Gerindra, nampaknya Prabowo ingin tetap memegang HKTI dan menggunakannya sebagai alat politiknya. Untuk itu Prabowo dalam Munas ke-7 di Bali melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Di antaranya adalah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART organisasi, dan pengurus lama tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri Munas tersebut. Bahkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, Pak Siswono Yudho Husodo, juga tidak mendapatkan undangan. Dan masih banyak lagi pelanggaran terhadap AD/ART organisasi yang dilakukan.”³

Secara lebih mendetail, Heroe Soeparto, Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI versi Oesman Sapta, yang juga satu-satunya pendiri HKTI yang masih hidup, menguraikan pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART organisasi yang telah dilakukan oleh Prabowo dan teman-temannya. Heroe mengatakan,

“Berawal dari Munas HKTI ke-7 di Bali yang dijalankan tidak sesuai dengan AD/ART organisasi. Diantaranya adalah Panitia Munas yang seharusnya ditunjuk oleh DPN, pada Munas tersebut ditunjuk secara sepihak oleh Prabowo. Jumlah peserta juga tidak disahkan oleh DPN. Dan seharusnya ada undangan terlampir, pada Munas HKTI 7 Bali surat undangan di-email kepada tiap Dewan Pengurus Provinsi. Dari sana kami menganggap bahwa Munas ini sudah tidak lagi sehat.”⁴

³ Hasil wawancara dengan Jusmi Dwi Atmoko (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jateng, versi OSO), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Permata Hijau, AA No.21 Semarang), Pada 7 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB - Selesai

⁴ Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanca Jaksel), pada 25 Juli 2011, Pukul 12.00 WIB-Selesai

Begitu juga dengan Isa Harun, salah satu Wakil Sekretaris Jendral DPN HKTI versi OSO, mengatakan hal yang senada. Bahwa menurut dia ada beberapa hal yang sifatnya prinsipil yang telah dilanggar dalam pelaksanaan Munas di Bali. Menurut Isa,

“Yang prinsipil adalah, Pertama, bahwa Prabowo tidak menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART. Prabowo mengelola organisasi tidak lagi dijalankan secara kolektif lagi, semisal setiap pertemuan tidak pernah quorum. Kedua, di dalam perencanaan pelaksanaan Munas seharusnya ada Rapat Pleno Pengurus Nasional. Yang terjadi adalah sebaliknya, Munas di Bali kemarin tanpa ada Rapat Pleno. Ketiga, SC dan OC seharusnya ditunjuk oleh hasil rapat Pengurus Harian DPN HKTI, itu juga tidak terjadi. Keempat, materi Munas seharusnya disebarluaskan kepada peserta Munas. Yang terjadi adalah materi Munas hanya dibahas di lingkup mereka sendiri. Kelima, terjadi pembreidelan hak suara peserta Munas, di mana peserta dari Pengurus Kabupaten/Kota tidak mendapatkan hak suara di dalam Munas. Padahal seharusnya yang memiliki hak suara dalam Munas adalah Pengurus Kabupaten/Kota bukan Pengurus Provinsi. Di dalam Munas Bali kemarin, Pengurus Provinsi yang memiliki hak suara, dan Prabowo dipilih secara aklamasi karena lebih dari 50% pengurus Provinsi menghendaki Prabowo menjadi Ketua Umum, ada yang mau protes tidak diperbolehkan. Aturan pemilihan Ketua Umum secara aklamasi seharusnya oleh 50%+1 dari jumlah Pengurus Kabupaten/Kota.”⁵

Karena ini sudah menyangkut hal yang sifatnya prinsipil, maka hasil Munas Bali, yang mendaulat Prabowo menjadi Ketua Umum, menurut pihak HKTI versi OSO tidaklah sah. Dan mereka bersikeras menyatakan bahwa aturan organisasi harus ditegakkan. Maka dibentuklah kepengurusan baru dengan Ketua Umum Oesman Sapta.

Berbeda dengan yang disampaikan di atas, Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo, melihat latar belakang historis terjadinya konflik dualisme di HKTI adalah upaya perebutan kembali HKTI, yang

⁵ Hasil wawancara dengan Isa Harun (Wakil Sekjen DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 26 Juli 2011. Pukul 10.00 WIB-Selesai

pada dahulunya seolah-olah *underbow* Golkar, dari Prabowo yang tidak lain adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Menurut Cahyo,

“Kalau berbicara tentang latar belakang sejarah, maka kita harus melihat ke depan dan ke belakang. Ke depan kita harus melihat bahwa pada tahun 2014 merupakan ajang pesta demokrasi yang juga merupakan ajang pertarungan antar politisi dan juga partai politik. Sedangkan HKTI merupakan instrumen kecil yang digunakan oleh Prabowo. Ke belakang, kita harus melihat bahwa HKTI ini didirikan pada masa kepemimpinannya pak Suharto. Jadi pada masa itu masih one man show, dimana kontrol masih sangat ketat. Dari sana banyak tokoh HKTI merupakan juga tokoh Golkar. Maka kita melihat seakan-akan HKTI ini adalah underbow dari Golkar.... Akan tetapi, dinamika politik yang ada setelah munculnya Gerindra adalah seolah-olah HKTI ini merupakan milik Gerindra. Meskipun tidak harus demikian. Dan dinamika politik seperti ini, membuat kelompok lain, politisi lain, atau partai politik lain cemas. Maka pada Munas di Bali, terjadilah konflik perpecahan ini.”⁶

Jadi menurut Cahyo, konflik dualisme kepengurusan HKTI adalah konflik yang memang sudah didesain untuk kepentingan politik Partai Politik tertentu untuk menuju Pemilu 2014. Jadi secara tidak langsung konflik yang di HKTI bukan konflik antar pengurus, akan tetapi konflik antar Partai Politik.

Seperti yang disampaikan pula oleh Manimbang Kahariady, Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Prabowo, bahwa sangat dimungkinkan Partai Politik berperan dalam konflik dualisme kepengurusan HKTI ini.

“Menurut saya sangat mungkin Partai Politik bermain di dalam konflik ini. Karena menurut hemat saya, politik adalah suatu gerakan yang memiliki tujuan. Nah, dalam konflik dualisme ini menurut saya tidak hanya sekedar masalah perebutan kekuasaan, tapi tentu ada kalkulasi-kalkulasi menuju Pemilu tahun 2014. Apalagi beberapa orang yang mengatasnamakan HKTI di bawah pimpinan Oesman Sapta adalah juga politisi. Jadi menurut saya ini adalah politik.”⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya, No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB- Selesai

⁷ Hasil wawancara dengan Manimbang Kahariady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Prabowo), bertempat di Gedung Cik's (Jl. Cikini Raya, No. 84-86, Cikini). Pada 20 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB- Selesai

Politisi berpengaruh di belakang Oesman Sapta yang dimaksud oleh Manimbang adalah Siswono Yudo Husodo yang adalah aktifis Partai Golkar, dan Heroe Soeparto yang adalah mantan pengurus Gerakan Tani MKGR, yang itu artinya juga berafiliasi kepada Golkar.

Memang sulit untuk mengambil kesimpulan tentang mana yang lebih dominan, apakah konflik ini murni karena permasalahan pelaksanaan mekanisme organisasi, ataukah sudah termasuk ke dalam permasalahan politik? Masing-masing pihak mengklaim bahwa merekalah yang benar dengan berbagai alasan. Akan tetapi, Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo, mengatakan bahwa konflik dualisme ini tidak hanya sekedar permasalahan pelaksanaan mekanisme organisasi, akan tetapi lebih pada adanya desain politik untuk menuju Pemilu periode tahun 2014 mendatang. Sedangkan menurutnya pasal-pasal yang ada didalam aturan organisasi ataupun AD/ART sangat mungkin dan sangat bisa diputar-balikkan.

“...Karena menurut saya permasalahan di HKTI ini adalah lebih pada kepentingan politik daripada mekanisme. Secara mekanisme sah menurut saya adalah hasil Munas Bali yang memilih Pak Prabowo sebagai Ketua Umum....”⁸

Selain itu, temuan di lapangan menyebutkan bahwa kepengurusan HKTI versi Oesman Sapta menggunakan dua alamat kantor Sekretariat. Kantor Sekretariat yang pertama menggunakan alamat di Gedung Arsip Kementerian Pertanian, Jl. RM Harsono No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Selain Kantor Sekretariat di Ragunan tersebut, kepengurusan HKTI versi Oesman Sapta juga menggunakan kantor Sekretariat Operasional yang beralamatkan di Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka,

⁸ Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya. No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB- Selesai

Jakarta Selatan. Alamat inilah yang dijadikan dasar dalam mendaftarkan HKTI ke Kemenkumham. Hal ini dikecam keras oleh jajaran pengurus HKTI versi Prabowo, karena dalam praktiknya HKTI Oesman Sapta tidak menggunakan Gedung Arsip Kementan sebagai Kantor Sekretariat. Gedung tersebut merupakan Kantor Sekretariat HKTI versi Prabowo, dan hal tersebut ilegal serta telah diajukan gugatan kepada PTUN oleh HKTI versi Prabowo.

Nuansa Politik yang Kental dan Aktor yang Berperan dalam Konflik

Begitu banyaknya aktifis dan tokoh partai politik yang didaulat menjadi pengurus HKTI, baik pengurus Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadikan spekulasi-spekulasi tentang adanya kepentingan politik dalam HKTI. Apalagi dengan Prabowo Subianto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menjadi Ketua Umum HKTI. Selain itu, HKTI adalah organisasi yang bergerak di bidang pertanian, yang bisa juga dikatakan sebagai mata pencaharian pokok bagi masyarakat Indonesia. Maka dari sana timbul pula spekulasi mengenai adanya kepentingan untuk menguasai ataupun mengatur perjalanan roda ekonomi, yaitu dengan mengontrol aliran perdagangan bahan pangan.

Susunan kepengurusan HKTI pimpinan Prabowo Subianto terlihat komposisi kepengurusan lebih banyak melibatkan politisi Senayan daripada petani. Banyak orang yang selama ini tidak terlibat dalam dunia pertanian tiba-tiba menjadi pengurus HKTI. Susunan kepengurusan yang terbentuk itu nampaknya merupakan sebuah reaksi dari adanya HKTI tandingan di bawah Oesman Sapta Odang. Prabowo Subianto terprovokasi oleh susunan pengurus HKTI di bawah Oesman Sapta Odang yang juga melibatkan banyak politisi dari lintas partai. Untuk menandingi kepengurusan itu maka Prabowo juga merekrut politisi Senayan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PAN, dan beberapa partai lainnya bergabung ke HKTI di bawah pimpinannya.

Rivalitas itu sangat terlihat misalnya, ketika adik kandung Gus Dur, Lily Wachid, dijadikan pendukung HKTI di bawah Oesman Sapta Odang, maka Prabowo Subianto mengajak Yenny Wahid, anak kandung Gus Dur, menjadi pengurus HKTI di bawah kepemimpinannya. Bila demikian, maka konflik dalam HKTI saat ini tak ubahnya bagaimana keadaan HKTI itu dikali pertama pembentukannya, yakni karena pengaruh kepentingan dan rivalitas antar partai politik.

Dengan demikian nuansa politik lebih kental daripada kepentingan genuine para petani yang membutuhkan asosiasi yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka. Hal ini diafirmasi oleh hampir semua informan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa nuansa kepentingan politiklah yang lebih ada di dalam konflik yang terjadi di HKTI ini. Jusmi Dwi Atmoko, Wakil Ketua HKTI Provinsi Jawa Tengah versi Oesman Sapta, menyatakan bahwa dalam konflik dualisme kepengurusan HKTI ini kepentingan politiklah yang bermain demi menuju ke Pemilu tahun 2014.

*"Kepentingan politiklah yang bermain di dalam konflik ini, untuk menuju ke Pemilu 2014 mendatang."*⁹

Andhi Arsono yang juga Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah versi Oesman Sapta, juga mengatakan hal yang serupa, bahwa ada kepentingan politik yang bermain di dalam konflik HKTI ini. Akan tetapi, tampaknya Andhi tidak memberikan pernyataan yang lengkap.

*"Secara politik, saya pribadi tidak dapat berbicara banyak. Akan tetapi, saya rasa kepentingan politik inipun ada."*¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Jusmi Dwi Atmoko (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jateng, versi OSO), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Permata Hijau, AA No.21 Semarang), Pada 7 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB - Selesai

¹⁰ Hasil wawancara dengan Andhi Arsono (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jateng, versi OSO), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Permata Hijau, AA No.21 Semarang), Pada 7 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB - Selesai

Heroe Soeparto menuduh bahwa kekacauan dan permasalahan dualisme kepengurusan HKTI adalah permainan Prabowo agar tetap bisa menggunakan HKTI sebagai kendaraan politiknya bersama Partai Gerindra.

“...Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah kepentingan politik Prabowo yang bermain, untuk tetap bisa menggunakan HKTI sebagai kendaraan politiknya pada Pemilu periode mendatang tahun 2014.”¹¹

Sepertinya terjadi kekhawatiran di antara para pengurus terhadap perjalanan politik Prabowo. Hal ini mengingat beberapa tokoh lama HKTI yang berafiliasi kepada kepengurusan HKTI versi Oesman Saptia. Pertanyaan besarnya adalah jika mereka telah mengetahui bahwa terjadi penyelewengan dan pelanggaran AD/ART sejak perencanaan Munas, mengapa para pengurus DPN HKTI lainnya tidak meluruskan, mengingat mereka juga sama-sama memiliki wewenang untuk itu?

Di pihak kepengurusan HKTI versi Prabowo, menyatakan bahwa ada upaya perebutan otoritas HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan oleh salah satu Partai Politik, yang tentu sangat kental nuansa politiknya. Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo, mengatakan bahwa seolah-olah HKTI dulunya adalah *underbow* dari Golkar.¹² Ini bisa dilihat bahwa sebagian besar posisi penting dalam HKTI diduduki oleh para tokoh dari Golkar atau yang berhubungan dengan Golkar. Katakanlah seperti Ketua Umum Martono yang juga aktifis KOSGORO, Siswono Yudo Husodo dari Golkar yang pernah menjadi Ketua Umum, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI, dan sekarang didaulat untuk menjadi anggota Dewan Penasehat DPN HKTI, atau Heroe Suparto yang juga merupakan Gerakan Tani MKGR, ia juga merupakan satu-satunya pendiri HKTI yang masih hidup. Bahkan Prabowo Subianto sendiri kenapa pada 2004 bisa menjadi

¹¹ Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 25 Juli 2011. Pukul 12.00 WIB-Selesai

¹² Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya, No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011. Pukul 11.00 WIB- Selesai

Ketua Umum HKTI, menurut Cahyo adalah tidak lain karena Prabowo juga merupakan orang yang dekat dengan Golkar. Lantas ketika Prabowo muncul dengan Partai Gerindra, terjadi semacam ketidakrelaan dari mereka bahwa ketika HKTI berafiliasi kepada selain Golkar. Maka terjadilah perebutan kembali HKTI dari Prabowo dan Partai Gerindra. Padahal menurut Cahyo, HKTI tidak dapat diinterpretasikan milik Partai Gerindra. Karena keduanya memiliki substansi dan eksistensi yang berbeda.¹³

Manimbang Kahariady, Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Prabowo, juga menyatakan bahwa dalam konflik dualisme kepengurusan HKTI lebih kental nuansa politiknya dari pada kepentingan ekonomi ataupun yang lainnya. Manimbang mengatakan,

“Saya berpendapat bahwa di dalam konflik ini sangat kental nuansa politisasinya. Menurut saya sangat kental kepentingan politiknya dalam upaya perebutan kekuasaan di HKTI ini. Karena dalam kami melangkah selalu berpedoman kepada aturan yang ada, sesuai prosedur, mekanisme, kriteria kerja, AD/ART. Munas sudah kami laksanakan sesuai dengan AD/ART dan pedoman organisasi.”¹⁴

Maka bisa dilihat bahwa pada dasarnya konflik dualisme kepengurusan di HKTI ini lebih kepada konflik antar Partai Politik, mengingat bahwa yang paling gencar dan keras berbicara tentang dualisme kepengurusan ini adalah pengurus HKTI yang berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, meskipun tidak semua pengurus HKTI yang berpartai politik berbicara tentang dualisme kepengurusan ini. Apabila dikerucutkan lebih lanjut, maka akan ditemukan polarisasi dukungan terhadap dua Partai Politik. Dua Partai Politik tersebut adalah Partai Gerindra yang

¹³ Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya, No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB- Selesai

¹⁴ Hasil wawancara dengan Manimbang Kahariady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Prabowo), bertempat di Gedung Cik's (Jl. Cikini Raya, No. 84-86. Cikini), Pada 20 Juli 2011. Pukul 13.00 WIB- Selesai

diinterpretasikan dengan kehadiran sosok Prabowo Subianto, dan Partai Golkar yang sering diinterpretasikan dengan adanya Siswono Yudo Husodo. Dengan kata lain pada dasarnya konflik dualisme kepengurusan di HKTI merupakan persetujuan antar Partai Politik.

Lantas dalam setting perjalanannya, pastilah terdapat satu orang atau lebih yang memiliki peran dalam bergulirnya konflik dualisme ini. Heroe Soeparto yang juga Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI versi Oesman Sapta, yang menyatakan bahwa Prabowo yang bermain dalam konflik dualisme ini, membeberkan sejumlah nama yang menurutnya adalah aktor-aktor kunci yang menyebabkan bergulirnya konflik dualisme kepengurusan HKTI. Diantaranya adalah Prabowo Subianto, Fadli Zon, Rahmat Pambudi, Supriyatno, dan Martin Hutabarat.¹⁵ Dari sekian nama yang disebutkan oleh Heroe hanya Rahmat Pambudi saja yang tidak berafiliasi langsung terhadap salah satu Partai Politik, sedangkan yang lainnya adalah berafiliasi terhadap Partai Gerindra. Maka dari sini, Heroe membuat satu kesimpulan bahwa Munas VII Bali merupakan langkah-langkah yang *disetting* oleh Prabowo Subianto dan orang-orang yang ada di lingkaran Partai Gerindra untuk menjadikan HKTI sebagai instrumen politik dalam mendukung Partai Gerindra pada Pemilu tahun 2014 mendatang.

Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo, tidak berkenan menyebutkan aktor-aktor yang bermain di dalam konflik dualisme kepengurusan HKTI secara personal, seperti yang disampaikan oleh Heroe Soeparto di atas. Cahyo mengatakan bahwa aktor yang bermain di dalam konflik dualisme kepengurusan HKTI adalah lebih bersifat kolektif daripada personal atau individual. Dari aktor individual tersebut, sangat dimungkinkan adanya partai politik yang berperan di dalam konflik tersebut.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 25 Juli 2011, Pukul 12.00 WIB-Selesai

“Berbicara tentang aktor, permasalahan di HKTI ini adalah salah satu bagian kecil dari Grand Design politik untuk menuju ke pesta demokrasi mendatang, yang kebetulan HKTI merupakan salah satu organisasi yang dijadikan instrumen politik di sana. Maka berbicara aktor kita tidak bisa menyebutkannya secara satu persatu. Ini adalah satu bentuk rencana besar yang dilakukan oleh satu kolektifitas yang mungkin besar pula. Jadi aktor di sini lebih bersifat kolektifitas daripada individu/personal, dan menurut pribadi saya sangat dimungkinkan adanya partai politik yang bermain di sana.”¹⁶

Jadi bisa dilihat semakin jelas bahwa Partai Politik memiliki kepentingan dan bermain di dalam konflik dualisme kepengurusan HKTI. Tujuan akhirnya adalah dukungan HKTI sebagai salah satu instrumen politik bagi Partai Politik tersebut, dalam upaya kemenangan dalam Pemilu periode tahun 2014 mendatang.

Pergerakan Kedua Kubu Kepengurusan

Pasca pecahnya HKTI menjadi dua kubu kepengurusan (kubu Prabowo dan kubu Oesman Sapta), bagaimana kondisi kedua kubu kepengurusan HKTI tersebut? Visi dan Misi yang diusung oleh kedua kubu kepengurusan HKTI tersebut? Dan juga apa saja program yang dijalankan oleh kedua kubu kepengurusan HKTI tersebut?

Nampaknya kedua kubu kepengurusan di HKTI mempertahankan tradisi lama dalam komposisi susunan kepengurusannya. Baik di kubu Prabowo maupun di kubu Oesman Sapta susunan kepengurusan terdiri dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang Partai Politik maupun yang tidak berlatar belakang Partai Politik. Di kubu Oesman Sapta, Isa Harun yang juga salah satu dari Wakil Sekjen DPN HKTI versi Oesman Sapta mengatakan bahwa di dalam kepengurusan HKTI di bawah

¹⁶ Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya, No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB- Selesai

Oesman Sapta lebih pelangi, dengan latar belakang atau *background* Partai Politik, dan juga lebih banyak lagi dari kalangan praktisi yang tidak berpartai politik.

“Tapi saya tegaskan di sini, bahwa kepengurusan kami lebih pelangi, dalam artian kami tidak mempermasalahkan background awal kami dari mana, yang penting visi dan misi kami satu, yaitu memajukan petani negara Republik Indonesia.”¹⁷

Dalam kepengurusan HKTI kubu Oesman Sapta bisa dilihat dalam susunan kepengurusannya, antara lain Ahmâd Mubarak dari Partai Demokrat menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI, Lili Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa menjabat sebagai Ketua DPN HKTI, Siswono Yudo Husodo menjadi Anggota Dewan Penasehat DPN HKTI, Isa Harun dari praktisi yang non partai, dan masih banyak lagi.

Anita Ariyani, salah seorang dari Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo, juga mengatakan hal yang sama. Bahwa kepengurusan HKTI di bawah pimpinan Prabowo sangat pelangi, dalam artian terdiri dari berbagai latar belakang Partai Politik. Bahkan menurut Anita dari sekian banyak total pengurus DPN HKTI versi Prabowo yang dari Partai Politik hanya beberapa, dan yang lebih dominan adalah dari praktisi yang non-Partai Politik.

“Sedangkan dalam hal komposisi kepengurusan, pengurus yang ada di kami sangat profesional, tidak mengedepankan background dirinya, dan lebih bervariasi latar belakang Parpolnya dengan yang dominan adalah dari praktisi petani. Dari keseluruhan pengurus HKTI yang berjumlah ratusan, yang dari parpol hanya beberapa saja.”¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Isa Harun (Wakil Sekjen DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanca Jaksel), pada 26 Juli 2011, Pukul 10.00 WIB-Selesai

¹⁸ Hasil wawancara dengan Anita Ariyani (Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo), bertempat di Bengawan Solo Cooffee (Kompleks Gedung Nusantara I DPR RI), Pada 19 Juli 2011, Pukul 14.30 WIB-Selesai

Akan tetapi dilihat dari susunan kepengurusannya, kepengurusan HKTI versi Prabowo juga berasal dari banyak yang memiliki *background* partai politik. Fadli Zon yang dari Partai Gerindra menjabat sebagai Sekretaris Jendral, Rahmat Pambudi yang tidak berlatar belakang Partai Politik menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Yenni Wahid putri Gus Dur menjabat sebagai Ketua Bidang Pemasaran Pertanian, Jafar Hafsah dari Partai Demokrat menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, Fadel Muhammad dari Golkar menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, Akbar Faisal dari Hanura menjabat sebagai Anggota Badan Pertimbangan Organisasi, Manimbang Kahariady praktisi yang non-parpol menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Ayang menarik, dalam hal visi dan misi, antara kedua belah kubu kepengurusan HKTI juga tidak terdapat perbedaan yang tajam. Kedua kubu kepengurusan HKTI sama-sama mengklaim membela dan memperjuangkan kepentingan petani dan pertanian. Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo, mengatakan bahwa baik pengurus versi Prabowo maupun pengurus versi Oesman Sapta, dalam hal visi dan misi tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Kedua kubu sama-sama ingin memperjuangkan bidang pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

*"Saya kira sama apa yang menjadi visi dan misi mereka dengan kita. Yaitu bagaimana memajukan pertanian dan mensejahterakan petani di Indonesia."*¹⁹

Heroe Soeparto, Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI versi Oesman Sapta, menyatakan visi dan misi HKTI secara umum sebagai berikut:

¹⁹ Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya, No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB- Selesai

*"...visi kita adalah mensyukuri Fitroh negara kita sebagai negara pertanian. Sedangkan misi kita adalah membangun negara Indonesia menjadi negara agro industri yang maju. Menjadi NAIC (New Agro Industri Countries), yaitu negara agro industri yang maju...."*²⁰

Sedangkan di kubu Prabowo Anita Ariyani, Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo, menyatakan bahwa mereka memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan bidang pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani dan kemajuan pertanian.

*"...kami memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan kepentingan petani Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan petani."*²¹

Program kerja yang ditawarkan juga masih berkisar dalam hal pertanian. Akan tetapi program yang ditawarkan untuk petani lebih variatif di kubu Oesman Sapta daripada di kubu Prabowo. Program yang ditawarkan oleh kubu Oesman Sapta tidak melulu pendampingan terhadap petani, akan tetapi juga mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan Mabes Angkatan Darat, dan juga dengan pemerintah Brazil dalam membudidayakan jagung dan kedelai, juga program pembuatan perkebunan jagung di pulau Jawa dengan jumlah total luas tanah kurang lebih seluas 50.000 hektar tanah. Seperti yang disampaikan oleh Heroe Soeparto,

"Kita ada beberapa program, di antaranya adalah kita sudah memiliki MOU dengan Mabes AD untuk mengelola sejengkal tanah di Angkatan Darat untuk kedaulatan pangan Indonesia. Selain itu kita membuat program penanaman

²⁰ Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 25 Juli 2011, Pukul 12.00 WIB-Selesai

²¹ Hasil wawancara dengan Anita Ariyani (Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo), bertempat di Bengawan Solo Cooffee (Kompleks Gedung Nusantara I DPR RI), Pada 19 Juli 2011, Pukul 14.30 WIB-Selesai

jagung 50.000 hektar. Kita juga sudah memiliki MOU dengan pemerintah Brazil untuk budi daya tanaman jagung dan kedelai."²²

Di HKTI kubu Prabowo, program kerja yang ditawarkan untuk petani, juga memiliki program kerja yang bervariasi. Seperti yang disampaikan oleh Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo,

*"Salah satunya adalah KTMI (Komunitas Tani Mandiri) yang di dalamnya adalah program ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani. Selain itu ada pendampingan-pendampingan terhadap petani, program energi mandiri yang terintegrasi dengan program ternak terpadu, program pertanian sehat...."*²³

Jadi bisa diketahui, bahwa kedua kubu kepengurusan HKTI memiliki visi dan misinya masing-masing, dan juga memiliki program kerjanya masing-masing. Lantas bagaimana mereka menjalankan program kerja mereka sedangkan di dalam internal organisasi mereka terjadi konflik dualisme kepengurusan yang belum dapat ditemukan titik terangnya.

Isa Harun, Wakil Sekjen DPN HKTI versi Oesman Sapta, menyatakan bahwa dengan adanya permasalahan dualisme kepengurusan sama sekali tidak mempengaruhi kinerja dan eksistensi mereka dalam bekerja. Ia menyatakan,

²² Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 25 Juli 2011, Pukul 12.00 WIB-Selesai

²³ Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya, No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB- Selesai

“Sama sekali tidak berpengaruh. Kita punya program di lapangan setiap hari, dan kami fokus pada program kami, dan kami tidak memikirkan tentang konflik ini.”²⁴

Anita Ariyani, Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo, juga menyatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Isa Harun. Lebih lanjut Anita menyatakan bahwa lebih banyak organisasi yang memperjuangkan kepentingan petani, maka akan lebih baik ke depannya.

“Kalau di HKTI pak Prabowo sama sekali tidak berpengaruh. Kami bekerja untuk petani, dan semakin banyak organisasi yang mengurus petani maka lebih baik.”²⁵

Berbeda dengan pernyataan Anita, Manimbang Kahariady, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN HKTI versi Prabowo, menyatakan bagaimanapun juga, meskipun fokus seluruh pengurus tertuju pada bagaimana menjalankan program kerja yang dicanangkan, akan tetapi dengan adanya dualisme kepemimpinan selanjutnya menimbulkan beberapa permasalahan konsolidasi di lapangan. Secara panjang lebar, Manimbang menjelaskan sebagai berikut,

“Secara implisit saya menangkap dari perkataan Pak Prabowo, Beliau menghimbau untuk tidak terlalu menguras energi untuk meladeni polarisasi konflik ini. Dan pada awalnya kami tidak menghiraukannya. Tapi lama kelamaan kami terganggu juga. Karena bagaimanapun juga dengan adanya dualisme kepemimpinan ini akan mempengaruhi konsolidasi kami ke bawah. Semisal muncul ucapan hari raya dari HKTI, tertanda Ketua Umum Oesman Sapta. Di tingkat bawah kan jadi bingung, yang benar yang mana? Padahal hasil Munas kan Ketua Umumnya Pak Prabowo. Akan tetapi, kami menghimbau kepada pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk

²⁴ Hasil wawancara dengan Isa Harun (Wakil Sekjen DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 26 Juli 2011, Pukul 10.00 WIB-Selesai

²⁵ Hasil wawancara dengan Anita Ariyani (Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo), bertempat di Bengawan Solo Cooffee (Kompleks Gedung Nusantara I DPR RI), Pada 19 Juli 2011, Pukul 14.30 WIB-Selesai

tidak terlalu menghiraukan konflik ini. Biarlah kami yang ada di DPN yang mengambil langkah yang lebih wise atau bijak dan lebih tenang.”²⁶

Jadi bisa dilihat bagaimana eksistensi kedua belah kubu kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi, meskipun sedang dililit oleh permasalahan kepengurusan kembar.

²⁶ Hasil wawancara dengan Manimbang Kahariady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Prabowo), bertempat di Gedung Cik's (Jl. Cikini Raya, No. 84-86, Cikini), Pada 20 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB- Selesai

BAB IV: POTENSI DAN ARAH REKONSILIASI

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah rekonsiliasi yang harus diambil. Apakah konflik dualisme kepengurusan ini ke depannya masih terbuka pintu untuk terwujudnya perdamaian?

Dalam hal ini, pertanyaan awal yang harus dijawab adalah mengapa sampai saat ini konflik dualisme kepengurusan ini belum dapat diselesaikan di internal kepengurusan HKTI? Heroe Soeparto, Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI versi Oesman Sapta, mengatakan kepengurusan HKTI yang dipimpin oleh Prabowo sama sekali tidak mau mengakui bahwa mereka telah melanggar AD/ART organisasi. Menurut Heroe mereka terus bersikukuh dan tidak mau mengalah. Sikap seperti inilah yang menurut Heroe adalah penyebab mengapa konflik dualisme kepengurusan masih belum terselesaikan di internal organisasi HKTI.

“Menurut saya karena mereka (kubu Prabowo) tidak mau mengalah untuk mengakui bahwa mereka melanggar AD/ART organisasi. Karena ini backgroundnya adalah background politik, dimana Prabowo ingin menjadikan HKTI sebagai kendaraan politiknya pada tahun 2014 nanti. Maka ia mau tidak mau harus tetap di HKTI, meskipun itu melanggar AD/ART organisasi.”²⁷

Manimbang Kahariady²⁸, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN HKTI versi Prabowo, dan Anita Ariyani²⁹, Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo,

²⁷ Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 25 Juli 2011, Pukul 12.00 WIB-Selesai

²⁸ Hasil wawancara dengan Manimbang Kahariady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Prabowo), bertempat di Gedung Cik's (Jl. Cikini Raya, No. 84-86, Cikini), Pada 20 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB- Selesai

mengatakan penyebab utama mengapa konflik dualisme belum dapat terselesaikan di dalam internal organisasi HKTI, adalah karena tidak adanya *good will* dari kubu Oesman Sapta untuk berdamai. Menurut Manimbang dan Anita, kedua belah kubu (Prabowo dan Oesman Sapta) telah dipertemukan dengan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kesbangpol Linmas Kementerian Dalam Negeri. Di dalam pertemuan tersebut diharuskan untuk membawa surat mandat dari instansi masing-masing. Kepengurusan HKTI kubu Prabowo telah memenuhi persyaratan dari Ditjen Kesbangpol Linmas dan membawa surat mandat. Akan tetapi pengurus HKTI versi Oesman Sapta tidak pernah membawa surat mandat yang disyaratkan oleh Dirjen Kesbangpol Linmas tersebut. Selama kurang lebih dua kali pertemuan pihak Oesman Sapta tidak pernah membawa surat mandat tersebut. Menurut Manimbang apabila dalam hal yang sekecil itu mereka tidak dapat sepakat dan memenuhinya, maka bagaimana mereka akan bisa sepakat dan memenuhi hal-hal yang lebih besar sifatnya?³⁰

Selama ini ada dua bentuk rekonsiliasi yang dijalankan dalam upaya menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan HKTI ini. Pertama, dengan cara mediasi dengan Ditjen Kesbangpol Linmas. Kedua, dengan pengajuan gugatan oleh kepengurusan HKTI versi Prabowo kepada PTUN atas manipulasi data yang dilakukan oleh HKTI versi Oesman Sapta. Kubu Oesman Sapta merasa tidak berkepentingan untuk melakukan langkah-langkah rekonsiliasi karena kepengurusan HKTI versi Oesman Sapta telah lebih dulu mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan Ham sebagai badan organisasi.

Akan tetapi, baik langkah mediasi maupun langkah hukum masih belum dapat memberikan titik terang dalam penyelesaian permasalahan dualisme kepengurusan

²⁹ Hasil wawancara dengan Anita Ariyani (Wakil Sekjen DPN HKTI versi Prabowo), bertempat di Bengawan Solo Cooffee (Kompleks Gedung Nusantara I DPR RI), Pada 19 Juli 2011, Pukul 14.30 WIB-Selesai

³⁰ Hasil wawancara dengan Manimbang Kahariady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Prabowo), bertempat di Gedung Cik's (Jl. Cikini Raya, No. 84-86, Cikini), Pada 20 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB- Selesai

HKTI ini. Langkah mediasi dengan Ditjen Kesbangpol Linmas Kementerian Dalam Negeri mengalami jalan buntu karena masing-masing pihak bersikukuh atas pandangannya masing-masing dan sama sekali tidak mau mengalah satu sama lain. Akibatnya setelah diadakan kurang lebih dua kali pertemuan, dan keadaan masih tidak mengalami perubahan, maka Ditjen Kesbangpol Linmas Kementerian Dalam Negeri menyerahkan penyelesaian lebih intensif di dalam internal organisasi. Apabila secara internal belum dapat diselesaikan, maka Ditjen Kesbangpol Linmas Kementerian Dalam Negeri tidak akan memberikan pengakuan atas keberadaan HKTI sebagai organisasi masyarakat (Ormas).

“Beberapa kali kami mendapatkan undangan dari Kementrian Dalam Negeri terkait masalah tersebut. Jadi gini, kubu Prabowo mengusulkan kepada Kemendagri untuk dipertemukan dengan pihak kami. Karena kami kan yang mendaftar terlebih dulu di Kemendagri, setelah itu datanglah kubu Prabowo mendaftar. Pihak Kemendagri tidak bisa mendaftar karena ada dua lembaga yang sama. Maka mereka mengusulkan untuk dipertemukan. Dalam pertemuan tersebut, mereka bersikukuh merekalah yang sah. Tapi secara legal formal, kamilah yang memegang pengakuan dari Kementrian Hukum dan Ham, sedangkan mereka tidak. Jadi kamilah yang sah secara legal formal. Karena seperti itu, pertemuan itu tidak membuahkan hasil apa-apa, dan dari Kemendagri menyerahkan kepada kami agar permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu secara internal. Jika masih ada dua lembaga yang sama, Kemendagri tidak akan mendaftar HKTI. Bagi kami itu tidak masalah, karena tanpa didaftar pun kami bisa eksis. Toh banyak juga LSM yang tidak terdaftar di Kemendagri kan?”³¹

Sedangkan langkah hukum dilakukan oleh kubu Prabowo karena menurut mereka kubu Oesman Saptia melakukan manipulasi data alamat kantor sekretariat HKTI. Jadi menurut mereka pendaftaran dan pengakuan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Ham adalah ilegal. Untuk harus diluruskan dengan jalan hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Namun langkah ini juga belum

³¹ Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 25 Juli 2011. Pukul 12.00 WIB-Selesai

mendatangkan hasil yang memuaskan. Menurut Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo, mengatakan bahwa belum terselesaikannya jalur hukum yang dilakukan oleh kepengurusan Prabowo adalah karena hukum itu sendiri adalah hakekatnya di bawah kelompok penguasa yang berkuasa di Indonesia saat ini, dan kelompok penguasa ini memiliki kepentingan atas HKTI juga ke depannya.

“...Permasalahannya adalah hukum tersebut adalah milik penguasa. Dan ini yang membuat jalur hukum yang kami lakukan menjadi panjang.”³²

Jadi ringkasnya, langkah-langkah rekonsiliasi dan penyelesaian masalah dualisme kepengurusan HKTI ini selalu mengalami jalan buntu karena secara internal organisasi masih belum bisa didamaikan terlebih dahulu. Selain itu, dinamika politik saat ini dan ke depannya sangat pula mempengaruhi proses rekonsiliasi dan penyelesaian masalah.

Lantas apakah konflik dualisme kepengurusan HKTI ini masih bisa diselesaikan? Dengan lebih optimis, Cahyo, Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo, mengatakan bahwa kemungkinan untuk berdamai dan konflik ini didamaikan adalah sangat terbuka luas, seluas kesempatan untuk terjadi konflik yang lebih besar dari ini. Cahyo bertendensi bahwa konflik dualisme kepengurusan HKTI adalah lahir dari dinamika politik. Maka berbicara tentang proses perdamaian adalah seharusnya juga berbicara tentang dinamika politik ke depannya. Dalam artian menurut Cahyo, bagaimana warna dinamika politik ke depan sangat mempengaruhi proses rekonsiliasi konflik dualisme kepengurusan tersebut.

³² Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya, No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011. Pukul 11.00 WIB- Selesai

“Sangat mungkin bisa didamaikan, dan juga sangat mungkin perang lebih besar. Kita lihat saja dinamika politik yang ada menjelang dan sesudah Pemilu periode mendatang. Pasti saya yakin ada yang dapat menjembatani permasalahan ini.”³³

Heroe Soeparto, Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi DPN HKTI versi Oesman Sapta, juga mengatakan hal yang sama, yaitu konflik ini masih bisa didamaikan. Akan tetapi, tergantung kepada *good will* dari HKTI kubu Prabowo untuk bergabung dengan mereka. Karena menurut Heroe Soeparto HKTI itu adalah satu, dan jika mereka masih ingin menggunakan nama dan logo HKTI, maka mereka harus ikut bergabung dengan kubu Oesman Sapta. Apabila kubu Prabowo bersikeras tidak mau bergabung dengan kubu Oesman Sapta, maka mereka harus mengganti nama dan logo yang mereka pakai. Menurut Heroe semakin banyak organisasi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan petani itu akan lebih baik ke depannya, dan sama sekali tidak ada masalah.³⁴ Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Manimbang Kahariady, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN HKTI versi Prabowo. Bahwa apabila mereka (kubu Oesman Sapta) masih ingin menggunakan nama dan logo HKTI, maka mereka harus bergabung dengan kepengurusan Prabowo. Apabila tidak mau bergabung, maka mereka harus berganti nama dan logo organisasi.³⁵

³³ Hasil wawancara dengan Cahyo (Wakil Ketua DPP HKTI Provinsi Jawa Tengah Bidang OKK versi Prabowo), bertempat di Sekretariat HKTI Provinsi Jateng (Jl. Bukit Raya, No 22 Semarang), pada 17 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB- Selesai

³⁴ Hasil wawancara dengan Heroe Soeparto (Pendiri HKTI dan Sekretaris BPO DPN HKTI versi OSO), bertempat di Kantor HKTI (Jl. Dr. Satrio C4-18, Casablanka Jaksel), pada 25 Juli 2011, Pukul 12.00 WIB-Selesai

³⁵ Hasil wawancara dengan Manimbang Kahariady (Ketua DPN HKTI Bidang Hubungan Antar Lembaga versi Prabowo), bertempat di Gedung Cik's (Jl. Cikini Raya, No. 84-86, Cikini). Pada 20 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB- Selesai

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Diantaranya adalah:

Konflik dualisme kepengurusan HKTI memiliki esensi yang berbeda di antara kedua kubu kepengurusan. Kubu Oesman Sapta menyatakan bahwa latar belakang mereka membuat kepengurusan sendiri adalah karena dalam praktiknya kepengurusan Prabowo tidak menjalankan roda kepengurusan sesuai dengan AD/ART organisasi. Pelanggaran terhadap AD/ART organisasi tersebut dilakukan karena Prabowo ingin menjadikan HKTI sebagai kendaraan politik bagi Prabowo menuju Pemilu tahun 2014 mendatang. Sedangkan di kubu Prabowo berpendapat bahwa konflik dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh HKTI adalah upaya perebutan kekuasaan HKTI dari tangan Prabowo oleh sekelompok orang memiliki kepentingan politik menuju ke Pemilu tahun 2014 mendatang.

Konflik dualisme kepengurusan HKTI lebih diwarnai dengan nuansa politik daripada nuansa ekonomi atau professional. Di mana orang-orang berkepentingan dengan HKTI adalah mereka yang memiliki atau membawa motif politiknya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan Pemilu periode tahun 2014 mendatang.

Kubu Oesman Sapta menyatakan bahwa aktor-aktor yang berperan penting dalam perpecahan HKTI adalah mereka para tokoh Partai Gerindra atau yang sejalan dengan Partai Gerindra. Seperti Fadli Zon, Martin Hutabarat, Rahmat Pambudi, dan Supriyatno. Sedangkan di kubu Prabowo lebih melihat aktor yang berperan dalam perpecahan HKTI sebagai suatu kolektifitas suatu kelompok, dan tidak menyebutkannya secara personal atau individual. Karena menurut mereka perpecahan di tubuh HKTI adalah suatu rencana politik yang dirancang oleh sekelompok orang secara kolektif untuk menuju Pemilu periode tahun 2014 mendatang. Dan kolektifitas tersebut sangat dimungkinkan terdiri dari satu Partai Politik atau lebih.

Secara organisasional, kedua kubu kepengurusan HKTI tidak memiliki perbedaan yang berarti. Kedua kubu memiliki tujuan, visi, dan misi organisasi yang sama atau setidaknya mirip satu sama lain. Masing-masing kubu juga memiliki program kerja yang bervariasi, yang ditawarkan kepada para petanipun. Akan tetapi, di kubu Oesman Sapta gencar dilakukan publikasi tentang program kerja yang dilakukan, semisal *launching* program yang dijalankan. Seperti yang baru terjadi adalah *launching* penanaman jagung di lahan dengan total luas kurang lebih 50.000 hektar. Sedangkan di kubu Prabowo sama sekali tidak demikian. Dari sana sangat terlihat bahwa kepengurusan HKTI kubu Oesman Sapta ingin terlihat eksistensinya yang lebih dari kubu Prabowo.

Sesuatu yang menarik adalah, masing-masing kubu mengaku terus bekerja sesuai dengan program kerja masing-masing, serta mereka mengaku sama sekali tidak terganggu dengan adanya masalah dualisme kepengurusan tersebut. Hal ini terjadi karena anggota HKTI pada tingkat grassroots tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap organisasi. Karena selama ini HKTI di bawah kendali kaum elite, maka organisasi itu tidak bisa melakukan advokasi terhadap petani seperti ketika terjadi pengusuran lahan petani (sawah, kebun, dan ladang) atau masalah kelangkaan pupuk terjadi. Seharusnya HKTI menjadi tempat mengadu para petani, namun fungsi itu selama ini diambil oleh LSM. Kelompok LSM-lah yang selama ini justru mampu melakukan advokasi riil dan pembelaan terhadap kaum petani yang lahannya diserobot oleh pemerintah dan pengembang real estate, seperti yang terjadi dalam kasus di Cimacan, Rancamaya, Kedungombo, dan diberbagai tempat lainnya.

Rekonsiliasi ataupun jalan penyelesaian masalah masih belum membuahkan hasil lantaran masing-masing kubu kukuh memegang prinsip dan pandangannya masing-masing. Masing-masing kubu sama-sama tidak mau melepaskan HKTI sebagai suatu ormas yang bergerak di bidang pertanian. Masing-masing kubu menuduh kubu yang lainnya tidak memiliki *good will* untuk menyelesaikan permasalahan. Namun pada intinya adalah masing-masing kubu kepengurusan tidak

mau melepaskan HKTI. Menurut masing-masing kubu HKTI itu satu, jika masih ingin menggunakan nama dan logo HKTI maka salah satu dari kubu harus bergabung menjadi satu dengan salah satu kubu yang lainnya. Jika tidak mau, maka harus ganti nama dan logo organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, N. (2006). *Sociological Methods: A Sourcebook*. Aldine Transaction
- Firmansyah , Aritonang, E., Terome, H., Hari S.N, Bahari, S. (1999), *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa dan YAPPIKA.
- Jones, Gareth R. and George, Jennifer M. (2010), *Contemporary Management 5th edition*, New York: McGraw Hill.
- Czempiel, E.O. (1981), *Internationale Politik; Ein Konfliktmodell*, Paderborn: Schöningh.